

Kepercayaan Sosial Online di Pemerintah (Analisis Kebijakan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19)

Mustamin ^{1*}, Rustan ², Mirnawanti Wahab ³

^{1,2,3} Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

* mustaminaburaerah@gmail.com

Abstract

Pandemi COVID-19 telah menimbulkan permasalahan di berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, dan berbagai aspek kehidupan sosial. Selama situasi ini, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekannya penyebaran virus corona yang disebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tujuan dari penelitian ini menganalisis tingkat kepercayaan sosial online pada pemerintah terkait kebijakan pembatasan aktivitas selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis isi deskriptif. Sumber data penelitian literatur, dokumentasi, dan Twitter. Itu alat analisis yang digunakan adalah Nvivo 12 Plus. Hasilnya menunjukkan bahwa kegiatan tersebut kebijakan pembatasan (PSBB dan PPKM) masih kurang optimal dan merata menurunkan kepercayaan sosial. Aspek yang dominan adalah sikap dan sikap pemerintah perilaku dalam melaksanakan kebijakannya. Rendahnya kepercayaan masyarakat juga berdampak pada perilaku, sikap, dan kemauan masyarakat secara aktif dan sukarela. Penelitian ini berkontribusi untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah selama krisis periode karena pandemi COVID-19. Penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi efektifitas kebijakan publik di masa depan dan berdampak positif secara sosial penerimaan kebijakan dan menjembatani modal sosial.

Keywords: *Kepercayaan Sosial Online; Pemerintah; Analisis Kebijakan; Pandemi Covid-19*

Introduction

Pandemi COVID-19 telah menjadi masalah global saat ini dan telah mempengaruhi banyak orang aspek kehidupan manusia, termasuk masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia (Leach et al, 2021; Machmud et al, 2020). Berdasarkan terhadap dampak tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai cara melalui kebijakan selama ini pandemi. Pada awalnya, beberapa kebijakan pemerintah membatasi kegiatan tertentu yang dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah kebijakan untuk mengurangi kasus di ruang publik. PSBB meliputi penutupan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan tempat atau fasilitas umum lainnya. Namun, kebijakan tersebut kurang optimal dan telah diterima berbagai tanggapan dan kritik (Azhari et al, 2022). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kemudian meresponnya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan lain. Kebijakan tersebut dikenal dengan berbagai istilah, seperti Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Abdullah, 2020; Qodir et al, 2020).

Penertiban (PPKM) di Jawa dan Bali untuk membatasi aktivitas masyarakat di zona merah atau gelap. Kemudian, pemerintah menerapkan kebijakan lain yang disebut PPKM MIKRO. Aturan yang berlaku mengikuti label zona masing-masing lingkungan di setiap wilayah. Setelah menerapkan kebijakan, berikut kebijakan perpanjangan PPKM Mikro diikuti dengan kebijakan lainnya seperti PPKM Darurat dan PPKM Tingkat 3-4. Namun, kebijakan tersebut tetap menuai berbagai perhatian publik tanggapan di Indonesia, termasuk di ruang publik dan ruang digital atau media sosial (Allen, 2021). Selama pembatasan aktivitas berjalan, media sosial akan selalu mengekspresikan keinginan penggunanya. pendapat dan menyebarkan informasi dan edukasi (Cinelli et al. 2020; Suratnoaji et al, 2020).

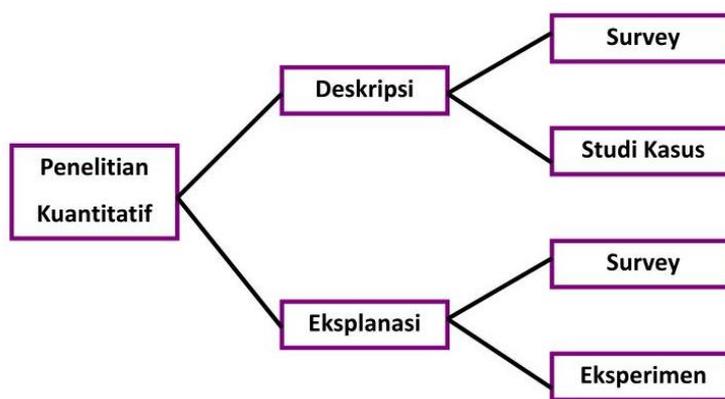
Selama ini kajian yang menganalisis kebijakan terkait pembatasan aktivitas hanya menilai pada tingkat kepercayaan sosial, terutama kepercayaan sosial online terbatas. Namun, beberapa tren dari penelitian sebelumnya dapat dipetakan. Pertama, pandemi COVID-19 telah memengaruhi respons pemerintah dalam mengantisipasi kasus tersebut dengan menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan (Suryahadi et al, 2021; Syuhada et al, 2021). Kedua, pandemi juga mempengaruhi kepercayaan sosial dan modal sosial terhadap efektivitas dan penerimaan kebijakan (Bargain et al, 2020). Ketiga, menjaga stabilitas kepercayaan masyarakat selama krisis akibat pandemi adalah aspek penting untuk mengurangi kasus dan, pada saat yang sama, berkontribusi untuk menjembatani modal sosial (Pitas et al, 2020; Wong et al, 2020).

Artikel ini mencoba untuk mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya dengan melakukan pendekatan analitis jejaring sosial online seperti Twitter, khususnya terkait dengan isu kebijakan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, Artikel ini dapat merumuskan dua pertanyaan: (a) Bagaimana tingkat kepercayaan sosial online terhadap kebijakan pemerintah terkait aktivitas pembatasan selama masa pandemi COVID-19 di Indonesia? (b) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kepercayaan sosial online terhadap kebijakan pembatasan aktivitas di Indonesia? Jawaban untuk ini dua pertanyaan memungkinkan ditemukannya solusi untuk memperbaiki situasi sosial dan menjadi bahan evaluasi pemerintah yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis isi deskriptif. Penelitian subjek adalah pengguna Twitter. Objek penelitian dilihat dari keterlibatan pengguna Twitter dalam isu-isu kebijakan yang terkait dengan pembatasan aktivitas. Data diperoleh dari Twitter, fokus pada kata kunci seperti COVID-19 Indonesia, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan PPKM (Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pengambilan data menggunakan Ncapture dan dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus. Perangkat lunak Nvivo 12 plus adalah alat analisis untuk ditampilkan data berupa teks dan gambar melalui proses pengkodean data. Hasil koding pada data adalah kemudian divisualisasikan, dijelaskan, dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis isi deskriptif. Penelitian subjek adalah pengguna Twitter. Objek penelitian dilihat dari keterlibatan pengguna Twitter dalam isu-isu kebijakan yang terkait dengan pembatasan aktivitas. Data diperoleh dari Twitter, fokus pada kata kunci seperti COVID-19 Indonesia, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan PPKM (Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Pengambilan data menggunakan Ncapture dan dianalisis menggunakan Nvivo 12 Plus. Perangkat lunak Nvivo 12 plus adalah alat analisis untuk ditampilkan data berupa teks dan gambar melalui proses pengkodean data. Hasil koding pada data adalah kemudian divisualisasikan, dijelaskan, dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

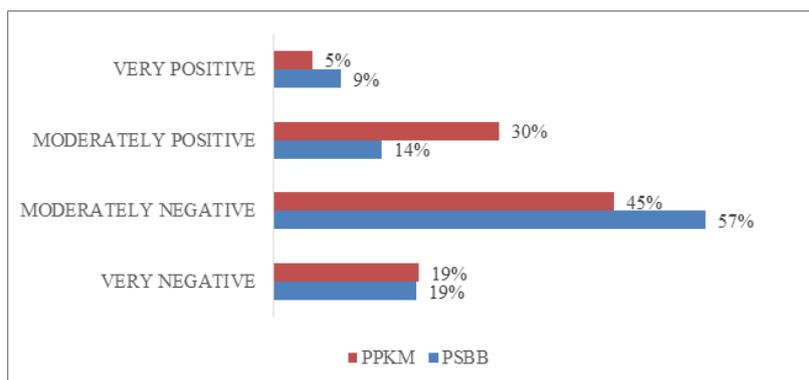


Gambar 1. Pendekatan Kuantitatif Deskriptif

Hasil dan Pembahasan

Trust Kebijakan Pembatasan Pembatasan Aktivitas

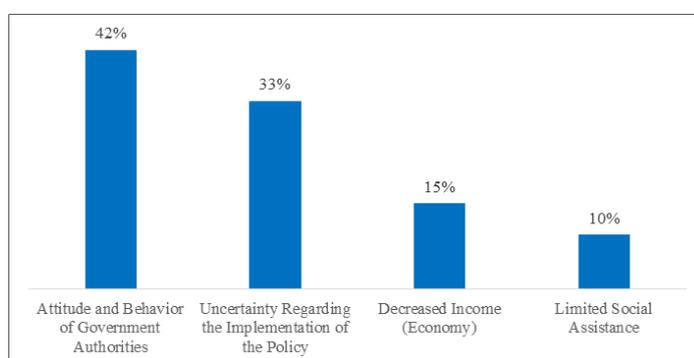
Kebijakan pembatasan kegiatan sudah dilakukan sejak awal tahun 2020, diketahui sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB berusaha menghentikan produktifitas masyarakat kegiatan dengan mempertimbangkan jumlah kasus yang terinfeksi rendah dan berharap untuk mengurangi jumlah kasus yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Memasuki tahun 2021, bangsa Indonesia pemerintah mengeluarkan kebijakan serupa yang disebut Penegakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM merupakan kebijakan yang identik dengan PSBB yang membatasi aktivitas masyarakat di berbagai zona rawan. Di masa pandemi, kebijakan PSBB dan PPKM mendapat respon dari masyarakat khususnya pengguna Twitter. Kepercayaan sosial yang rendah pada jejaring sosial online perlu menjadi perhatian bagi pemerintah di Indonesia merumuskan kebijakan yang menjaga kepercayaan publik, terutama pada masa transisi. Itukepercayaan sosial yang ditunjukkan dalam komunitas sosial akan berdampak positif menjembatani modal sosial dan, sekaligus mempengaruhi sikap dan penerimaan masyarakat. Modal sosial menyediakan manfaat selama periode kritis. Modal sosial yang tinggi merespons lebih efisien daripada yang memiliki modal sosial yang rendah (Pitas et al, 2020; Makridis et al, 2021).



Gambar 1. Online Social Trust terkait Kebijakan Pembatasan Aktivitas

Gambar 1 menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah membatasi kegiatan masyarakat mulai tahun 2020 sampai dengan 2021 dengan memberlakukan PSBB dan PPKM berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat selama masa COVID-19 pandemi. Kepercayaan yang rendah menyebabkan kebijakan yang diambil pemerintah tidak berjalan maksimal. In kepercayaan yang rendah membuat masyarakat kurang kooperatif dan partisipatif dalam melibatkan diri dan komunitas mereka untuk bekerja sama untuk mengurangi kasus COVID-19 dan penyebarannya.

Sebelumnya, kebijakan pembatasan sosial seperti PSBB dan PPKM berdampak negatif rendah kepercayaan sosial. Lebih lanjut, penelitian ini menguraikan beberapa faktor yang mendasari rendahnya sosial onlin kepercayaan dalam penerapan pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 di Indonesia.



Gambar 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Sosial Online

Gambar 2 menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepercayaan sosial online dalam kebijakan pembatasan aktivitas selama pandemi COVID-19. Pertama, perilaku dan sikap pemerintah kewenangan dalam menegakkan dan menjalankan kebijakan pembatasan kegiatan melalui kebijakan PSBB dan PPKM masih kurang optimal. Kedua, ketidakjelasan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan membuat publik bingung karena mengubah dan memberlakukan hal serupa kebijakan baru dengan ketentuan yang berbeda. Ketiga, pembatasan kegiatan PSBB terhadap PPKM dianggap menghambat produktivitas masyarakat dalam memperoleh pendapatan dan mempengaruhi sosial dan kehidupan ekonomi. Keempat, selama pembatasan kegiatan, masyarakat terdampak tidak menerima bantuan sosial secara adil dan merata.

Tingkat Kepercayaan Sosial Online

Berdasarkan temuan di atas, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi kasus infeksi selama pandemi COVID-19. Namun, kebijakan cenderung dianggap kurang optimal, sehingga berdampak pada kepercayaan sosial yang rendah. Kepercayaan sosial yang rendah juga menurunkan minat, sikap, dan kemauan publik untuk mematuhi kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan evaluasi dengan mengeluarkan kebijakan yang menitikberatkan pada aspek kepercayaan sosial. Tinggi kepercayaan sosial berkontribusi positif terhadap komunitas sosial dan dapat memengaruhi perilaku orang untuk terlibat aktif secara sukarela (Lachapelle et al., 2021).

Kepercayaan pada organisasi kelembagaan memfasilitasi penerimaan kebijakan yang diberlakukan selama periode pandemi (Di Marco et al, 2021). Kepercayaan dipandang sebagai aspek penting untuk memfasilitasi tata kelola yang baik. Klaim ini telah menjadi inspirasi yang muncul selama pandemi virus corona (Devine et al. 2021). Kepercayaan memiliki unsur-unsur yang perlu diperhatikan seperti karakteristik sosial budaya, individu kepribadian, dan sumber informasi. Konseptualisasi keyakinan ini cenderung beroperasi secara bersamaan dan saling mempengaruhi pada beberapa tingkatan (Chrysochoidis et al, 2009). Selama masa pandemi, banyak negara telah merespon penyebaran COVID-19 dengan berbagai kebijakan dan faktor terkait, yaitu tentang kepercayaan sosial, dimana kepercayaan sosial merupakan aspek yang menentukan respon dan kapasitas pemerintah dalam tahap pandemi (Toshkov et al, 2022).

Kesimpulan

Pemerintah telah memberlakukan kebijakan pembatasan kegiatan yang disebut Sosial Berskala Besar Pembatasan (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk mengurangi kasus di berbagai wilayah Indonesia. Namun, kebijakan tersebut kurang optimal dan cenderung menurunkan kepercayaan sosial dalam komunitas sosial, khususnya jejaring sosial online. Rendah kepercayaan sosial juga berdampak pada perilaku, kemauan, dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintah selama pandemi. Aspek yang paling dominan adalah milik pemerintah perilaku dan sikap dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah harus mengevaluasi setiap kebijakan sekaligus memperhatikan dan menjaga kepercayaan sosial. Kajian ini diharapkan dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan publik di masa depan dan berdampak positif terhadap penerimaan sosial atas kebijakan dan menjembatani modal sosial.

Acknowledgments

References

- Abdullah, I. (2020). COVID-19: Threat and fear in Indonesia. *Psychological trauma: theory, research, practice, and policy*, 12(5), 488. <https://doi.org/10.1037/tra0000878>
- Allen, Sydney. 2021. "Indonesia Faces Criticism for Lack of Financial Support amid Lockdowns." *Globalvoices.Org*. Retrieved (<https://globalvoices.org/2021/07/28/indonesia-faces-criticism-for-lack-of-financial-support-amid-lockdowns/>).
- Azhari, B., & Fajri, I. (2022). Distance learning during the COVID-19 pandemic: School closure in Indonesia. *International Journal of Mathematical Education in Science and Technology*, 53(7), 1934-1954. <https://doi.org/10.1080/0020739X.2021.1875072>
- Bargain, O., & Aminjonov, U. (2020). Trust and compliance to public health policies in times of COVID-19. *Journal of public economics*, 192, 104316. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104316>
- Chrysochoidis, G., Strada, A., & Krystallis, A. (2009). Public trust in institutions and information sources regarding risk management and communication: Towards integrating extant knowledge. *Journal of Risk Research*, 12(2), 137-185. <https://doi.org/10.1080/13669870802637000>
- Cinelli, M., Quattrocioni, W., Galeazzi, A., Valensise, C. M., Brugnoti, E., Schmidt, A. L., ... & Scala, A. (2020). The COVID-19 social media infodemic. *Scientific reports*, 10(1), 1-10.
- Devine, D., Gaskell, J., Jennings, W., & Stoker, G. (2021). Trust and the coronavirus pandemic: What are the consequences of and for trust? An early review of the literature. *Political Studies Review*, 19(2), 274-285. <https://doi.org/10.1177/1478929920948684>
- Di Marco, G., Hichy, Z., & Sciacca, F. (2022). Attitudes towards lockdown, trust in institutions, and civic engagement: A study on Sicilians during the coronavirus lockdown. *Journal of Public Affairs*, 22, e2739. <https://doi.org/10.1002/pa.2739>
- Lachapelle, E., Bergeron, T., Nadeau, R., Daoust, J. F., Dassonneville, R., & Bélanger, É. (2021). Citizens' willingness to support new taxes for COVID-19 measures and the role of trust. *Politics & Policy*, 49(3), 534-565. <https://doi.org/10.1111/polp.12404>
- Leach, M., MacGregor, H., Scoones, I., & Wilkinson, A. (2021). Post-pandemic transformations: How and why COVID-19 requires us to rethink development. *World development*, 138, 105233. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105233>
- Machmud, M., Masmuh, A., & Nasirin, C. (2020). Artificial intelligence in the public health sector: The use of telemedicine in Indonesia during Covid-19. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 10106-10118.
- Makridis, C. A., & Wu, C. (2021). How social capital helps communities weather the COVID-19 pandemic. *PloS one*, 16(1), e0245135. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245135>
- Pitas, N., & Ehmer, C. (2020). Social Capital in the Response to COVID-19. *American Journal of Health Promotion*, 34(8), 942-944. <https://doi.org/10.1177/0890117120924531>
- Qodir, Z., Effendi, G. N., Jubba, H., Nurmandi, A., & Hidayati, M. (2020). COVID-19 and chaos in Indonesia social-political responsibilities. *Journal of Talent Development and Excellence*, 12(1), 4629-4642.

- Suratnoaji, C., & Arianto, I. D. (2020). Public opinion on lockdown (PSBB) policy in overcoming covid-19 pandemic in indonesia: Analysis based on big data twitter. *Asian Journal for Public Opinion Research*, 8(3), 393-406.
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Yumna, A. (2021). The impact of Covid-19 and social protection programs on poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(3), 267-296. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.2005519>
- Syuhada, K., Wibisono, A., Hakim, A., & Addini, F. (2021). Covid-19 risk data during lockdown-like policy in Indonesia. *Data in Brief*, 35, 106801. <https://doi.org/10.1016/j.dib.2021.106801>
- Toshkov, D., Carroll, B., & Yesilkagit, K. (2022). Government capacity, societal trust or party preferences: what accounts for the variety of national policy responses to the COVID-19 pandemic in Europe?. *Journal of European Public Policy*, 29(7), 1009-1028. <https://doi.org/10.1080/13501763.2021.1928270>
- Wong, A. S., & Kohler, J. C. (2020). Social capital and public health: responding to the COVID-19 pandemic. *Globalization and Health*, 16, 1-4.